

Penanganan Terorisme Dinilai Banyak Melanggar HAM

ANTARA FOTO/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

Selama 12 tahun terakhir, 118 terduga teroris mati dalam kegiatan antiteror kepolisian.

Ageng Wijaya

ageng_w@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kepolisian kerap melanggar standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan terduga tindak pidana terorisme. Ketua Bidang Pemantauan Komnas HAM Natalius Pigai mengungkapkan bahwa lembaganya mencatat, sejak 2003 hingga sekarang, kepolisian, termasuk Detasemen Khusus Antiteror 88, telah menembak mati 118 terduga teroris. "Beberapa mungkin memang terkait dengankelompok teror. Tapi yang lainnya, polisi bahkan tak punya cukup bukti keterlibatan mereka," kata Pigai kepada *Tempo*, kemarin.

Pigai mengatakan prosedur umum penanganan mengharuskan kegiatan penangkalan terorisme bertujuan melumpuhkan terduga, bukan memmatikan. Dia menilai tembak mati melanggar hak asasi karena terduga teroris tidak bisa menyampaikan pembelaan diri atau penyangkalan.

Tak hanya itu, menurut dia, Komnas HAM mencatat sedikitnya 700 terduga teroris disinyalir mengalami kekerasan dan penyiksaan selama proses hukum. Pelanggaran ditengarai



Jenazah terduga teroris Siyono saat akan dikuburkan di Desa Brengkungan, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (13/3).

kerap terjadi di lapangan ketika polisi menangkap para terduga teroris hingga proses pengiriman ke kepolisian daerah.

Komnas HAM mengatakan sejumlah terduga terorisme menceritakan pernah mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan selama proses penangkapan dan penanganan di sel kepolisian sektor atau kepolisian daerah. "Banyak pemukul dilakukan polisi hanya karena pelampiasan emosi," kata Pigai.

Menurut Pigai, Komnas HAM telah merekomendasikan kepada pemerintah agar penanganan tindak pidana terorisme diaudit. Tak hanya itu, SOP juga harus diperbaiki. Meski terorisme tergolong sebagai kejahatan luar

biasa (*extraordinary crime*), Pigai mengingatkan, "Penanganan antiterorisme harus tetap dalam koridor yang tepat."

Dalam sepekan terakhir, penanganan polisi terhadap terorisme menjadi sorotan setelah kematian Siyono, terduga teroris, dalam proses pemeriksaan Densus 88, Jumat pekan lalu. Warga Dukuh Brengkungan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, itu ditangkap di masjid sebelah rumahnya, Selasa pekan lalu.

Senin lalu, Markas Besar Kepolisian RI membenarkan adanya dugaan kesalahan SOP dalam pengawalan Siyono. Namun Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan menampik ang-

gapan bahwa tindakan kepolisian terhadap terduga terorisme selama ini dianggap melanggar HAM. Kebanyakan terduga yang kemudian tewas, kata dia, akibat melawan. "Kalau melawan, masak anggota diam saja? Jadi ada pembelaan diri," kata Anton, kemarin. "Bukan bermaksud untuk memmatikan."

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengingatkan agar Densus 88 tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah terhadap terduga teroris. "Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang," ujar dia, kemarin. Fadli juga meminta agar kasus tewasnya Siyono diungkap.

● FRANCISCO / DEWI SUCI / INGE KLARA SAFITRI